

ABSTRAK
Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Di Kota Bengkulu

Oleh:
Ernita Dalimunte
2263201023

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bengkulu berdasarkan perspektif *Collaborative Governance*. Penelitian dilatarbelakangi oleh implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui koperasi berbasis kelurahan. Pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, partisipasi masyarakat yang belum optimal, serta perlunya penguatan koordinasi antaraktor. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, pemerintah kelurahan, pengurus koperasi, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pelaksanaan Program KKMP di Kota Bengkulu telah berjalan cukup baik dan mencerminkan prinsip *Collaborative Governance*.

Kondisi awal didukung kebijakan pemerintah, dukungan pemerintah daerah, dan respons positif masyarakat, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Desain kelembagaan telah memiliki aturan, prosedur, dan pembagian peran yang jelas. Kepemimpinan fasilitatif diwujudkan melalui pembinaan, pendampingan, dan koordinasi oleh Dinas Koperasi dan UKM. Proses kolaboratif berlangsung melalui sosialisasi, musyawarah, dialog, serta komitmen bersama antarpemangku kepentingan. Penelitian menyimpulkan bahwa tata kelola KKMP di Kota Bengkulu telah mengarah pada tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan koperasi, partisipasi masyarakat, serta pendampingan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan program.

Kata Kunci: Tata Kelola, *Collaborative Governance*, Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

ABSTRACT

Governance Analysis of the Implementation of the Merah Putih Urban Village Cooperative Program (KKMP) in Bengkulu City

By:

Ernita Dalimunte

2263201023

This study aims to analyze the governance of the implementation of the Merah Putih Urban Village Cooperative Program (Koperasi Kelurahan Merah Putih/KKMP) in Bengkulu City from the perspective of Collaborative Governance. The study was motivated by the implementation of Presidential Instruction Number 9 of 2025 concerning the Acceleration of the Establishment of Merah Putih Village/Urban Village Cooperatives, which aims to strengthen the community's economy through urban village-based cooperatives. The implementation of the program continues to face several challenges, including the limited human resource capacity of cooperative administrators, suboptimal community participation, and the need to strengthen coordination among stakeholders. The study employed a qualitative method using a descriptive approach.

Data were collected through observations, interviews, and documentation involving the Bengkulu City Office of Cooperatives and SMEs, urban village governments, cooperative administrators, and community members. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while the validity of the findings was ensured through source, technique, and time triangulation. The results indicate that the governance of the KKMP implementation in Bengkulu City has been functioning relatively well and reflects the principles of Collaborative Governance.

The initial conditions were supported by government policies, local government support, and positive community responses, although limitations in human resources and facilities remain. The institutional design has established clear regulations, procedures, and role distributions. Facilitative leadership has been demonstrated through guidance, assistance, and coordination provided by the Office of Cooperatives and SMEs. The collaborative process has been carried out through socialization, deliberation, dialogue, and shared commitment among stakeholders. The study concludes that the governance of the KKMP program in Bengkulu City has progressed toward effective, participatory, and sustainable governance. Strengthening human resource capacity, cooperative institutional development, community participation, and continuous assistance remains necessary to optimize the achievement of the program's objectives.

Keywords: Governance, Collaborative Governance, Merah Putih Urban Village Cooperative (KKMP).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia dibangun atas asas kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945, yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi munculnya sistem ekonomi kerakyatan melalui lembaga koperasi sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang mampu memperkuat ekonomi rakyat dan memajukan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, koperasi bukan sekadar badan usaha, tetapi juga wadah partisipatif bagi anggota untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan ekonomi secara kolektif (Soebijono, 2017).

Perekonomian Indonesia saat ini berada dalam situasi yang dinamis, ditandai oleh pertumbuhan yang relatif stabil namun tetap berhadapan dengan berbagai tantangan struktural. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya produktivitas ekonomi pada tingkat masyarakat masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius.

Upaya penguatan ekonomi nasional tidak dapat bertumpu pada kebijakan makro semata karena keberlanjutan pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat (BPS, 2025). Keterlibatan lembaga ekonomi lokal menjadi penting dalam mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga koperasi muncul pertama sekali dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1967 sebagai

Lembaga ekonomi rakyat yang mampu mengorganisasi potensi komunitas secara lebih terstruktur. Peran koperasi terbukti efektif dalam menyediakan akses permodalan, menciptakan peluang usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal,

Perkembangan ekonomi di tingkat kelurahan masih mengalami berbagai tantangan besar, terutama berkaitan dengan kemandirian ekonomi, ketersediaan pekerjaan lokal, dan kemampuan lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah mengoptimalkan peran koperasi dalam perekonomian masyarakat dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang merupakan strategi nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 (Sekretariat Kabinet RI, 2025).

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk membentuk 80.000 koperasi sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah. Arahan di tingkat nasional tersebut menekankan pentingnya pengelolaan yang baik, kolaborasi antar lembaga, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pihak kelurahan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi (Sekretariat Kabinet RI, 2025).

Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan melalui penguatan ekonomi berbasis Kebersamaan dan Gotong-royong. Dimana tujuan utama Koperasi Merah Putih adalah

menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada pasar besar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Zahro et al. 2025). Dengan Koperasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga dengan menyediakan layanan simpan-pinjam yang mudah diakses serta menciptakan peluang kerja lokal, serta memperbaiki efisiensi rantai pasok sehingga harga kebutuhan pokok dapat ditekan. Bagi petani dan pelaku usaha kecil, koperasi diharapkan memperkuat posisi tawar sehingga nilai jual hasil produksi meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terdorong lebih merata (Saragih & Widodo, 2021). Untuk memastikan tujuan tersebut dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola kelembagaan yang jelas serta prosedur pembentukan koperasi yang terstruktur dan memiliki landasan hukum yang kuat.

Proses pembentukan koperasi dilakukan melalui mekanisme wawancara di tingkat kelurahan untuk mencapai kesepakatan mengenai pendirian koperasi serta menentukan jenis usaha yang cocok dengan potensi yang ada di daerah tersebut (Saputri and Hardiyan 2025). Tahapan ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi dan partisipasi anggota yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Selanjutnya, pengurus mengajukan pendaftaran secara resmi melalui situs Koperasi Merah Putih dengan melampirkan berita acara musyawarah dan berita acara rapat anggota. Langkah berikutnya adalah mengurus akta pendirian melalui notaris, kemudian diikuti dengan pembuatan NPWP dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS sebagai

bentuk legalitas penuh dari koperasi (Simkopdes 2025). Proses ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya percepatan pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan.

Implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih berlangsung di Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat daerah. Dari total 1.513 desa dan kelurahan yang menjadi target pembentukan koperasi, tercatat sebanyak 1.288 koperasi telah terbentuk, yang menunjukkan adanya upaya percepatan pembentukan kelembagaan koperasi oleh pemerintah daerah.

Jumlah koperasi yang telah terbentuk tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan aspek legalitas dan keberfungsian kelembagaan. Dari keseluruhan koperasi yang terbentuk, baru 192 koperasi yang memiliki status badan hukum secara resmi, sehingga pelaksanaan kebijakan masih cenderung bersifat administratif. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek tata kelola, kesiapan organisasi, serta koordinasi antaraktor masih memerlukan perhatian serius, khususnya pada level pelaksanaan di daerah seperti Kota Bengkulu.

Berdasarkan data dari (Simkopdes 2025) pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Bengkulu telah mencapai 67 koperasi secara administratif. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perkembangan pelaksanaan KKMP masih sangat rendah, yaitu di bawah 25%. Dari seluruh koperasi yang telah terbentuk, hanya KKMP Pagar Dewa yang telah beroperasi, memiliki struktur pengurus yang aktif, serta menjalankan unit kegiatan awal. Koperasi lainnya masih berada pada tahap persiapan dan

belum melaksanakan fungsi kelembagaan sesuai mandat kebijakan nasional. Kondisi tersebut menjadikan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Pagar Dewa sebagai salah satu contoh nyata implementasi program tingkat kelurahan di Kota Bengkulu.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti juga menemukan beberapa persoalan mendasar, seperti keterbatasan fasilitas operasional koperasi yang mencakup belum tersedianya sarana dasar seperti ruang kerja yang memadai, perangkat administrasi, sistem pencatatan keuangan yang terstandar, serta akses teknologi pendukung layanan koperasi, partisipasi masyarakat yang masih rendah, serta struktur kepengurusan yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan dan realitas implementasi di tingkat lokal. Program KKMP yang seharusnya dilaksanakan melalui sinergi antarpihak justru menghadapi dinamika koordinasi yang belum solid, baik antara pemerintah daerah, perangkat kelurahan, maupun masyarakat calon anggota koperasi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa persoalan utama tidak semata-mata terletak pada aspek administratif pembentukan koperasi, tetapi lebih dalam pada tata kelola pelaksanaan program, khususnya dalam membangun kolaborasi antaraktor yang terlibat (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor lintas sektor tidak lagi memadai jika dianalisis hanya dengan pendekatan tata kelola konvensional. Perkembangan teori menunjukkan bahwa kebijakan publik

yang bersifat kompleks dan berbasis komunitas lebih tepat dianalisis menggunakan teori *Collaborative Governance*, yaitu suatu model tata kelola yang menekankan keterlibatan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan secara kolektif (Ansell & Gash, 2008; Emerson And Nabatchi 2015). Teori ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi, kepercayaan, komitmen bersama, serta kapasitas aktor dalam bekerja secara sinergis.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya kolaborasi antaraktor sering menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan berbasis masyarakat. Soebijono (2018) menemukan bahwa rendahnya kapasitas SDM dan minimnya pengawasan internal menjadi penghambat utama tata kelola koperasi. Penelitian Yusma dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa penyimpangan kewenangan dan lemahnya koordinasi kelembagaan menyebabkan prinsip tata kelola koperasi tidak berjalan efektif. Sementara itu, penelitian terbaru oleh Arzewiniga and Zulkarnain (2025) menegaskan bahwa program Koperasi Merah Putih cenderung bersifat top-down dan kurang melibatkan kebutuhan serta kapasitas lokal, sehingga berpotensi melemahkan keberlanjutan koperasi di tingkat akar rumput.

Penelitian terdahulu sebagian besar masih berfokus pada koperasi yang telah lama beroperasi atau pada konteks pedesaan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih pada awal implementasi di wilayah

perkotaan, khususnya dengan menggunakan perspektif tata kelola kolaboratif, masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik kelurahan sebagai wilayah administratif perkotaan memiliki kompleksitas sosial dan birokrasi yang berbeda dengan desa, sehingga memerlukan pendekatan tata kelola yang berbeda.

Kondisi tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan yang jelas antara kondisi ideal yang diharapkan oleh kebijakan nasional yaitu terbangunnya koperasi kelurahan berbasis kolaborasi dengan kondisi empiris di Kota Bengkulu yang menunjukkan keterbatasan dalam pelaksanaan program KKMP. Kesenjangan antara kondisi seharusnya dan kondisi senyatanya inilah yang menjadi dasar akademik dan empiris bagi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana tata kelola pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bengkulu dijalankan melalui perspektif *Collaborative Governance*, serta sejauh mana kolaborasi antaraktor terbangun dalam tahap awal implementasi program tersebut.

Berdasarkan uraian dan fenomena serta teori yang ada, untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Di Kota Bengkulu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di kota Bengkulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di kota Bengkulu.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini bisa menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami lebih dalam mengenai konsep tata kelola pemerintahan dan kelembagaan koperasi, terutama dalam konteks pelaksanaan program pemerintah seperti Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat serta mengembangkan teori terkait Tata Kelola Kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. Penelitian ini juga memberi kontribusi dalam pengembangan model tata kelola koperasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

c. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bengkulu, Dinas Koperasi dan UKM, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam meningkatkan sistem tata kelola, memperkuat

kapasitas SDM, dan memperbaiki koordinasi dalam pelaksanaan Program Koperasi Kelurahan Merah Putih.

